



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG NURDIYATMAN, SH.**

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. M. SAELANY MACHFUDZ, SE.**

Jabatan : Walikota Pekalongan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Walikota Pekalongan



H. M. SAELANY MACHFUDZ, SE.

Pekalongan, 4 Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Dindagkop & UKM
Kota Pekalongan

BAMBANG NURDIYATMAN, SH.

NIP. 19610507 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp 9,43 Trilyun
		Persentase UMKM menerima KUP/ KUR	60,27 %
2.	Meningkatknya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	19,19 Juta US\$
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	100 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	85
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900
6.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	54 %
7.	Program penilaian kesehatan koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat	74 %
8.	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase capaian peningkatan kapasitas SDM Koperasi	100 %
9.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase capaian peningkatan pemberdayaan koperasi	100 %
10.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM difasilitasi penguatan kelembagaan sentra	38 %
11.	Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	0,73 %
12.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan sarana distribusi perdagangan khususnya Pasar Rakyat dan PK5	100 %
13.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 %
14.	Program pengembangan ekspor	Persentase jumlah UMKM yang menjadi ekportir	5 %
15.	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen	100 %

16.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya	100 %
17.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %

Program

	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Rp 66.500.000	APBD
2. Program penilaian kesehatan koperasi	Rp 46.200.000	APBD
3. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Rp 390.304.000	APBN (DAK)
4. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Rp 100.000.000	APBD
5. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Rp 143.000.000	APBD
6. Program pengembangan UMKM	Rp 810.500.000	APBD
7. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp 13.120.591.000	APBD
8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp 525.500.000	APBD
9. Program pengembangan ekspor	Rp 129.600.000	APBD
10. Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Rp 364.792.000	APBD
11. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp 468.000.000	APBD
12. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 9.241.510.000	APBD
Jumlah	Rp 25.406.497.000	



Walikota Pekalongan

H. M. SAELANY MACHFUDZ, SE.

Kepala Dindagkop & UKM
Kota Pekalongan

BAMBANG NURDIYATMAN, SH.
NIP. 19610507 199002 1 001